



HUBUNGAN BILATERAL TURKI - INDONESIA: PASCA-KEGAGALAN KUDETA MILITER

Adirini Pujayanti*)

Abstrak

Pasca kudeta, kekuasaan politik Presiden Erdogan semakin kuat. Ia telah kembali mengontrol penuh angkatan bersenjata Turki dan memberlakukan kondisi negara darurat di Turki. Pascakudeta yang gagal terhadap pemerintahannya, Presiden Erdogan berkomitmen menumpas dan membersihkan terorisme, terutama gerakan pro Fethullah Gulen. Terjadi penangkapan besar-besaran terhadap semua pihak yang diduga terkait dengan kudeta. Kondisi negara darurat Turki turut memengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Turki. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia perlu menekankan pentingnya penghormatan kepada konstitusi dan prinsip demokrasi. Termasuk dalam hal ini tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri masing-masing.

Pendahuluan

Pada tanggal 18 Juli 2016, kudeta militer gagal menjatuhkan Pemerintahan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Fethullah Gulen seteru Erdogan dituduh menjadi dalang kudeta tersebut. Gulen adalah seorang ulama pendiri gerakan Hizmet pendukung Islam liberal ke sejumlah negara. Dahulu Erdogan dan Gulen merupakan mitra yang berhasil melemahkan lembaga militer Turki. Kemitraan tersebut retak sejak terjadinya skandal korupsi tahun 2013. Gerakan Islam liberal pimpinan Gulen kini dianggap sebagai kelompok teroris oleh pemerintahan Erdogan dan dituduh ingin membangun pemerintahan tandingan (*parallel state*).

Kegagalan kudeta disebabkan kepercayaan rakyat Turki kepada pemerintah Erdogan sangat besar. Sektor ekonomi dan pendidikan maju pesat

memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Turki juga berhasil membangun kerja sama dengan banyak negara, termasuk Indonesia. Pasca-kegagalan kudeta militer, Presiden Erdogan memberlakukan keadaan darurat di negaranya. Kebijakan status darurat Turki tersebut memengaruhi hubungan internasional Turki dengan banyak negara, termasuk Indonesia.

Status Kondisi Negara Darurat

Kebijakan Turki dalam keadaan status darurat diberlakukan Presiden Erdogan selama tiga bulan. Jika situasi kembali aman, masa darurat akan diperpendek menjadi 45 hari. Selama masa darurat, Pemerintah khususnya Presiden, memiliki kekuasaan memotong jalur birokrasi di parlemen untuk memberlakukan

*) Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: apujayanti@yahoo.com



undang-undang baru dan membatasi atau meniadakan hak dan kebebasan rakyat. Kekuasaan pemerintah yang semakin luas tidak hanya ada pada pemerintah pusat, tetapi juga di pemerintahan provinsi.

Fethullah Gulen Terrorist Organization (FETO) adalah sebutan dari Pemerintah Turki untuk para pengikut ulama Fethullah Gulen. Otoritas Turki secara masif melakukan aksi pembersihan FETO di tubuh militer, kepolisian, kehakiman, dan pendidikan. Hampir 9.000 anggota polisi, pegawai negeri, dan staf pemerintah atau lebih dari 50.000 orang termasuk guru, dosen, pejabat pemerintah, perwira militer, dan warga sipil ditangkap. Lama masa penahanan pihak yang dicurigai diperpanjang hingga 30 hari, melebihi masa penahanan normal yang maksimal empat hari. Selanjutnya, pengadilan akan memutuskan mereka dikembalikan ke penjara atau dibebaskan. Penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai, ditengarai belum akan berhenti.

FETO banyak bergerak di bidang pendidikan dan diketahui memiliki sejumlah lembaga dan organisasi pendidikan. Dewan Pendidikan Tinggi Turki menutup lebih dari 1.000 sekolah swasta dan membubarkan lebih dari 1.200 organisasi dan yayasan yang diduga berafiliasi dengan Fethullah Gulen. Lebih dari 1.600 pengajar dari berbagai universitas diminta mengundurkan diri dan lisensi mengajar 21.000 orang yang bekerja di bidang pendidikan swasta dicabut dan tidak diizinkan lagi bekerja di institusi pelayanan publik. Akademisi dilarang melakukan perjalanan kerja ke luar negeri dan mendesak mereka yang tengah berada ataupun mengajar di mancanegara untuk segera kembali ke tanah air.

Reaksi Internasional

Aktivis HAM, Amnesti Internasional, dan Uni Eropa (UE) memiliki bukti para tahanan mengalami tindak kekerasan dalam status keadaan darurat Turki. Komisioner Tinggi PBB akan segera mengirim tim khusus untuk memantau kondisi negara darurat Turki dan akan mendatangi satu persatu tempat penahanan. Mereka meminta Pemerintah Erdogan untuk mematuhi hukum dalam penanganan para tersangka. Upaya Presiden Erdogan untuk melakukan restorasi hukuman mati terhadap pihak yang terlibat kudeta semakin memperburuk hubungan UE dengan Turki. Keinginan Turki menjadi anggota UE akan ditolak sebagai sanksinya.

Sementara hubungan Turki dengan Amerika Serikat (AS) juga memburuk. Pemerintah AS menolak ekstradisi Fethullah Gulen, yang kini bermukim di negaranya, ke Turki, meski kedua negara memiliki perjanjian ekstradisi pelaku tindak kriminal. AS menilai hal itu sebagai upaya menyalahgunakan proses ekstradisi sebagai alat politik. Sikap menunda AS diartikan Turki merupakan kebijakan standar ganda AS dalam penumpasan terorisme internasional. Turki membalas kebijakan tersebut dengan mendekati kepada Rusia dalam upaya kerja sama anti terorisme.

Kondisi internal Turki dan reaksi internasional terhadap pemerintahan Erdogan saat ini membuat Turki tidak kondusif bagi kerjasama internasional. Hal ini patut dicermati oleh Pemerintah Indonesia, mengingat kedua negara berpotensi menjalin kerjasama internasional di bidang ekonomi dan pendidikan.

Hubungan Ekonomi Indonesia – Turki

Hubungan bilateral Indonesia dan Turki selama ini berjalan baik. Kedua negara bekerja sama di bidang ekonomi, budaya, maupun pendidikan. Dengan meningkatnya kerja sama ekonomi kedua negara, Pemerintah Indonesia membentuk konsulat jenderal di Istanbul, sentra bisnis Turki di tahun 2013. Hubungan ekonomi Indonesia dan Turki cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu yang paling pesat adalah di bidang turisme dan investasi. Di bidang turisme, semakin banyak wisatawan Indonesia yang mengunjungi Turki, sementara di bidang investasi, pengusaha-pengusaha Turki makin berminat menanamkan investasinya di Indonesia.

Hubungan baik kedua negara juga ditandai dengan dibukanya penerbangan langsung antarnegara. Sejak tahun 2015, Turkish Airlines menjadi satu-satunya maskapai penerbangan Eropa yang menawarkan penerbangan langsung dari dan menuju Indonesia dengan frekuensi penerbangan setiap hari. Indonesia merupakan pasar wisata yang menguntungkan bagi Turki. Warga Indonesia yang mengunjungi Turki bisa mencapai 60.000 orang pertahun. Wisatawan Indonesia ke Turki umumnya bersamaan atau dipaketkan dengan kegiatan ibadah umroh ke Arab Saudi.

Di bidang perdagangan, Turki merupakan mitra dagang utama Indonesia ke-7 di kawasan Eropa. Menurut data Kementerian perdagangan, dalam dua tahun terakhir ini neraca perdagangan Indonesia terhadap Turki

surplus besar mencapai 909,01 juta dollar AS. Ekspor Indonesia ke Turki pada tahun 2015 senilai 1,15 miliar dollar AS. Komoditas ekspor terbesar Indonesia ke Turki adalah tekstil, produk kertas, karet, batubara, serat sintetis, minyak sawit, alas kaki, dan komponen kendaraan.

Kerjasama ekonomi Selatan-Selatan menjadi penting bagi kedua negara. Di tahun 2015, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia disertai sekitar 200 pengusaha Turki untuk memperkuat kerjasama ekonomi kedua negara. Setidaknya ada 3 hal yang disepakati kedua negara, yakni membangun perdagangan bebas kedua negara, menghilangkan hambatan perdagangan, dan membentuk *joint economic commission* untuk menggali peluang perdagangan dan kerjasama ekonomi lainnya. Kedua negara juga sepakat membangun kerjasama di industri peralatan militer, pembuatan kapal-kapal kecil hingga pembangkit listrik tenaga gas.

Pemerintah Erdogan menyatakan kondisi darurat Turki tidak berpengaruh pada perekonomian negara dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara mitra. Namun demikian, Pemerintah Indonesia perlu terus memantau situasi dan dampak kudeta terhadap perdagangan Indonesia – Turki. Salah satu hal yang paling perlu mendapat perhatian adalah lalu lintas ekspor dan impor dari dan ke negara tersebut. Sejauh ini belum ada informasi gangguan terhadap kapal niaga dari dan ke Turki. Meskipun demikian, dengan memburuknya hubungan Turki dengan UE dan kecaman internasional terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut saat ini, Pemerintah Indonesia perlu dengan cermat mengantisipasi kemungkinan kemunduran ekonomi Turki.

Kerja Sama Pendidikan

Indonesia dan Turki memiliki sejarah kerja sama di bidang pendidikan. Dalam upaya meningkatkan hubungan kerjasama budaya, Pemerintah RI dan Turki telah menandatangani persetujuan kerja sama pertukaran program kebudayaan untuk tahun 2010 – 2012. Di bidang pendidikan, Indonesia dan Turki telah memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) bidang pendidikan yang mengatur pendirian Sekolah Turki di bawah yayasan pendidikan *Pacific Nations Social and Economic Development Association* (PASIAD) di beberapa kota di Indonesia. Kerjasama di bidang pendidikan

kedua negara merealisasikan model sekolah yang ada di Turki ke Indonesia. Kerjasama terkait manajemen sekolah tersebut bersifat kontrak dengan jangka waktu tertentu. Pemerintah Turki memberikan beasiswa bagi pelajar Indonesia untuk meneruskan pendidikan di Turki dengan menawarkan 66 beasiswa strata-1 dan pascasarjana bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang ingin belajar ke negara itu, sebagai upaya meningkatkan hubungan kedua negara yang telah berjalan baik. Di lain pihak, pemerintah Indonesia juga mengundang pelajar dan mahasiswa Turki belajar di Indonesia.

Pascakudeta, yayasan pendidikan PASIAD dinyatakan oleh pemerintah Erdogan sebagai bagian dari (FETO). Negara-negara mitra Turki diminta menutup aktivitas yang berhubungan dengan FETO, diantaranya, Indonesia, Yordania, Azerbaijan, Somalia dan Niger. Dalam siaran pers yang diterbitkan 28 Juli 2016, sebagai partner strategis Turki, Indonesia diharapkan mendukung perang melawan FETO sebagai organisasi teroris dengan menutup sekolah-sekolah tersebut. Kedutaan Turki merilis nama-nama sekolah tersebut sebagai berikut:

- 1) Pribadi Bilingual Boarding School, Depok;
- 2) Pribadi Bilingual Boarding School, Bandung;
- 3) Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School, Tangerang Selatan;
- 4) Semesta Bilingual Boarding School, Semarang;
- 5) Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School, Jogjakarta;
- 6) Sragen Bilingual Boarding School, Sragen;
- 7) Fatih Boy's School, Aceh;
- 8) Fatih Girl's School, Aceh;
- 9) Banua Bilingual Boarding School, Kalimantan Selatan.

Pemerintah Turki juga mengklaim mendapat informasi dari Kementerian Agama di Indonesia terkait aktivitas Gulen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah di Jakarta. Hal ini diklarifikasi pihak UIN yang telah memutuskan kerja sama dengan lembaga pendidikan Turki, *Fethullah Gulen Chair* (FGC), sejak April 2016 lalu. Salah satu alasannya adalah belum ada hasil signifikan dari kerja sama yang dijalin melalui MoU sejak 2008. FGC merupakan media berkarya para profesor dalam melakukan penelitian atau menulis jurnal atas nama UIN Jakarta, serta untuk mereka mempersiapkan bahan mengajar di S1, S2, dan S3. Fungsi-fungsi ini belum dilakukan oleh FGC.

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI merekomendasikan untuk meninjau ulang posisi *Chair* untuk FGC di UIN. Selama ini pihak UIN tidak berkomunikasi langsung dengan Kedubes Turki di Jakarta terkait pemutusan kerja sama karena hal tersebut dilakukan Dinas Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Sejak kegiatan PASIAD ditutup oleh Kementerian Luar Negeri pada November 2015, semua sekolah di Indonesia sudah tidak ada afiliasi dengan yayasan tersebut. Permintaan pemerintah Turki tersebut merupakan intervensi terhadap urusan dalam negeri Indonesia yang tidak perlu ditanggapi. Kemendikbud memastikan kurikulum yang digunakan sekolah-sekolah yang pernah kerja sama dengan PASIAD adalah sistem kurikulum nasional, meski mereka menggunakan dua bahasa dalam kegiatan belajar mengajar. Bilingual bahasa, Indonesia dan Turki, diterapkan karena ada kemungkinan siswa mendapat beasiswa sekolah ke Turki. Meski secara kelembagaan sudah tidak ada kerja sama, sekolah yang ada di daftar Kedubes Turki tersebut masih mempekerjakan guru asal Turki namun dalam kapasitas mereka selaku pribadi, bukan anggota PASIAD. Pemerintah Indonesia tidak perlu menutup sekolah-sekolah tersebut. Bahkan harus melindunginya karena berada di wilayah Indonesia dan tunduk sepenuhnya pada aturan hukum Indonesia.

Penutup

Dengan kondisi keamanan Turki yang mengkhawatirkan saat ini, DPR perlu mengingatkan Pemerintah agar sangat berhati-hati menyikapi kondisi Turki. Turki adalah negara sahabat yang potensial bagi perekonomian Indonesia. Kesalahan dalam menyikapi kondisi Turki saat ini dapat mengganggu hubungan baik yang telah terbina selama ini. Meskipun demikian penghormatan Indonesia terhadap demokrasi dan penegakan HAM sebaiknya juga tidak dikorbankan. Dalam hubungan bilateral Indonesia-Turki, Pemerintah Indonesia perlu menekankan pentingnya penghormatan terhadap konstitusi dan prinsip demokrasi. Termasuk dalam hal ini tidak melakukan intervensi dalam masalah dalam negeri masing-masing.

Turki telah menjadi salah satu tujuan wisata WNI. Pemerintah harus dapat memastikan keselamatan dan keamanan mereka selama di negara tersebut. Oleh karena itu, DPR perlu menanyakan kepada Pemerintah

mengenai sikap resmi Pemerintah Indonesia terhadap situasi Turki saat ini. Di antaranya dengan kemungkinan perlunya pemberlakuan kebijakan peringatan perjalanan (*travel warning*) ke Turki.

Pemerintah harus mencermati status darurat yang diberlakukan pemerintah Erdogan dan reaksi internasional terhadap kebijakan Presiden Erdogan tersebut, dengan mempertimbangkan kemungkinan terganggunya hubungan ekonomi kedua negara sementara waktu. Oleh karena itu, Pemerintah diminta mencari alternatif negara baru sebagai pengalihan bagi ekspor produk Indonesia ke Turki agar kepentingan nasional tidak terdampak.

Referensi

- "Dekret di Turki Menuai Kecaman", *Media Indonesia*, 25 Juli 2016.
- "Erdogan Kukuhkan Kekuasaan", *Media Indonesia*, 21 Juli 2016.
- "Indonesia Menolak Permintaan Turki", *Kompas*, 20 Juli 2016.
- "Krisis Turki Erdogan Tutup Ribuan Sekolah dan Yayasan", *Kompas*, 22 Juli 2016.
- "Turki Darurat Tiga Bulan", *Kompas*, 22 Juli 2016.
- "Turkish Airlines Ekspansi ke Bali", *Kompas*, 22 Juli 2016.
- "28 Jul 2016, Kedutaan Turki Minta Sekolah-sekolah Terkait Gulen di Indonesia Ditutup", <http://news.detik.com/berita/3263970/kedutaan-turki-minta-sekolah-sekolah-terkait-gulen-di-indonesia-ditutup>, diakses 1 Agustus 2016.
- "Ini Alasan UIN Jakarta Putus Kerja Sama dengan Fethullah Gulen Chair", <http://news.detik.com/berita/3264837/ini-alasan-uin-jakarta-putus-kerja-sama-dengan-fethullah-gulen-chair>, diakses 1 Agustus 2016.
- "Kemlu: Indonesia Harap Kondisi Turki Pasca-Kudeta Segera Pulih", <http://global.liputan6.com/read/2554041/kemlu-indonesia-harap-kondisi-turki-pasca-kudeta-segera-pulih>, diakses 25 Juli 2016
- "Profil Negara dan Kerjasama Indonesia – Turki", <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=78>, diakses 1 Agustus 2016.
- "Turki Soroti Sekolah Gulen Mendikbud: Kontrak dengan Pasiad Selesai Tahun Lalu, Sekolah Tetap Buka", <http://news.detik.com/berita/3264614/mendikbud-kontrak-dengan-pasiad-selesai-tahun-lalu-sekolah-tetap-buka>, diakses 1 Agustus 2016.